

Semua Perizinan Terintegrasi

- ▶ Rini Beri Pujian Terkait MPP
- ▶ 2 Menteri Kunjungi Mal Pelayanan



TRIBUN/IST

KUNJUNGI MPP- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Menteri PANRB Asman Abnur mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Mereka memuji MPP yang bisa menyatukan semua persoalan investor sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

BATAM, TRIBUN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam sangat bagus. Ia mengatakan bahwa Kota Batam merupakan pemerintah yang berbeda dengan tempat lain, ada Badan

Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Melalui MPP ini dapat menyatukan semua persoalan investor sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

"MPP ini sangat bagus, Batam jauh lebih bagus

lagi MPP-nya. Saya senang dibawah kesini dan program ini juga didukung oleh Kejaksaan Agung," ujar Rini dalam kunjungan kerjanya, Rabu (11/4) ke Kota Batam.

Amsakar Keluhkan Pengembang Bandel

► Drainase di Perumahan Banyak tak Beres

BATAM, TRIBUN - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengeluhkan, banyaknya pengembang yang bandel. Itu lantaran antara pengembang yang satu dan pengembang lainnya, tidak menyiapkan saluran drainase yang cukup.

Alhasil meski baru bebera-

pa jam Batam diguyur hujan, banyak tempat-tempat yang tergenang banjir. Seperti di Piayu, Batam Center, Marina dan lainnya. Ujung-ujungnya kenyamanan masyarakat terganggu.

"Banyak sekali kami turun ke lapangan, antara perumahan yang satu dan lain,

dempet drainasenya. Ada yang tak ada, ada drainase tapi kecil," keluh Amsakar, Selasa (10/4).

Karena itu, ia meminta kepada REI Batam bisa memformulasikan satu kebijakan, dengan mempertimbangkan drainase tersebut. Supaya tak terjadi lagi banjir ke de-

pannya.

"Jadi saat membangun itu, perlu dipertimbangkan juga space lahannya untuk drainase. Kalau ada anggota REI yang bandel, kita minta diajak kembali lurus," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD

REI Khusus Batam. Achyar Arfan mengakui, kondisi properti di Batam, banyak drainasenya yang berdempetan antara perumahan yang satu dan lainnya. Namun Achyar menyebut hal ini terjadi, lantaran Batam tidak punya masterplan yang terintegrasi, antara satu proyek dengan proyek lainnya.

"Setiap kita bangun properti itu pasti ada jalan dan drainasenya. Cuma kita bangun hari ini, di pintu lainnya belum ada rencana pembangunan dan kita tidak tahu itu punya siapa. Jadi kita bangun ini (drainase) hanya ber-

dasarkan perkiraan kebutuhan," kata Achyar.

Menurut Achyar, alangkah lebih bagusnya jika ada masterplan yang terintegrasi soal itu. Sehingga ketika akan membangun, pengembang sudah punya acuan yang jelas, berapa besaran drainase yang bakal dibangun.

"Seperti di kawasan Marina. Katakanlah di sana ada 30 proyek perumahan. Itu cuma ada gambar PL-PL (peta lokasi), tak pernah ada gambar jalan, saluran. Sementara untuk saluran ini bukan

hanya besar saja, miringnya kemana juga perlu diatur," ujarnya.

Achyar mengatakan, di daerah lain, biasanya pengaturan panjang kali lebar drainase dan jalan ini, ditentukan pemerintah. Sehingga lebih memudahkan pengembang dalam membangun.

"Tapi soal ini sudah ada diskusi antara Pemko dan BP Batam. Dalam hal ini di bagian perencanaan. Dari REI juga rencananya mau buat pertemuan terkait masalah drainase ini," kata Achyar. (**wie**)

Semua Perizinan

Sambungan Hal.13

Rini datang berkunjung ke Batam bersama Menteri Pendeayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur dan Kejaksaan Agung, HM Prasetyo. Rombongan disambut oleh Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo. Di MPP rombongan berkeliling melihat pelayanan yang ada di masing-masing konter pelayanan perizinan di sana.

Dimulai dari konter kejaksaan, melihat pelayanan e-tilang. Para menteri berdialog dengan petugas yang bertugas memberikan pelayanan e-tilang. Bagaimana proses pengurusan bagi masyarakat yang kena tilang dan prosedur penyelesaiannya. Di konter layanan mandiri, rombongan melihat masyarakat yang me-

lakukan upload dokumen untuk mengurus perizinan. Sambil bersenda gurau, Rini bersama rombongan lainnya berkomunikasi dengan masyarakat. Dilanjutkan meninjau konter layanan BNI, ATB, dan balai nikah yang disediakan oleh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Batam.

Rini juga mempertanyakan proses pengurusan perizinan apabila investor ingin berinvestasi dibidang hotel. Verbiyan, salah seorang petugas di MPP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) menjelaskan bahwa yang utama ditanyakan kepada investor adalah terkait lahan. Apabila calon investor belum mempunyai lahan maka akan diarahkan ke BP Batam. Apabila lahan sudah tersedia dan seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan calon investor membutuhkan kontraktor untuk

mengerjakan pembangunan maka akan diarahkan ke Kadin untuk mendapatkan kontraktor.

"Ini program presiden yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Penekanan paling utama bahwa perizinan sudah betul-betul non tunai dan transparansi. Dari perbankan mendukung penuh program ini," sebut Rini lagi.

Menpan-RB, Asman mengatakan bahwa sejak tahun 2017 lalu kementerian mencoba untuk mengintegrasikan perizinan dari tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Katanya, ada empat daerah yang menjadi percontohan DKI, Surabaya, Bali dan Banyuwangi. "Respon datangnya dari Batam dan disupport oleh gubenuur. Sehingga gedung yang tadinya tidak ada apa-apa disulap seperti saat ini," kata Menpan memuji MPP Batam.

Saat ini MPP sudah menjadi viral dan sudah ada 19 kota yang antre untuk mendirikan MPP. Ke depan pelayanan perizinan terselesaikan tidak lagi hitungan hari melatinkan hitungan jam. Diharapkan dengan cepatnya proses perizinan investasi bisa tumbuh. Pelayanan perizinan juga sudah transparan dengan adanya MPP karena tidak ada sentuhan antara pengurus dengan otoritas. "Dengan adanya program ini bisa menjadi model di Indonesia," sebutnya.

Kejaksaan Agung, HM Prasetyo mengatakan MPP Kota Batam ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. MPP bertujuan karena pemerintah ingin meningkatkan pelayanan, transparan. Melalui pelayanan ini diharapkan tidak ada lagi terjadi penyimpangan dan mempermudah tugas aparat hukum. (***/hat**)